KAJIAN NA
RAPERDA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- ABSTRAK:
- a. Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat melalui sistem pemerintahan daerah yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka pemenuhan kebutuhan setiap warga masyarakat.; b. Kualitas dan struktur pelayanan publik perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.; c. Sebagai upaya untuk pemenuhan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang baik serta untuk memberikan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pengaturan hukum untuk mendukungnya.; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 87 Tahun 2014;
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai Pelayanan Publik yang meliputi: Pembina, Penanggung Jawab, dan Penyelenggara; Hak, Kewajiban dan Larangan; Kerjasama Pelayanan Publik; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Inovasi Pelayanan Publik; Peran serta Masyarakat; dan Pengawasan dan Evaluasi.